

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak Revisi Kode Komersial Jepang tahun 1993 terhadap tata kelola perusahaan, dengan fokus pada praktik *soukaiya*—pemerasan melalui manipulasi rapat umum pemegang saham. Sebelum revisi, struktur *keiretsu* dan lemahnya regulasi menciptakan celah bagi *soukaiya* untuk menekan perusahaan secara terbuka. Revisi dilakukan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap praktik pemerasan ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perubahan kebijakan melalui studi literatur dan menyoroti kasus Nissan sebagai ilustrasi kerentanan perusahaan sebelum revisi. Temuan menunjukkan bahwa revisi berhasil memperketat hak suara, meningkatkan transparansi keuangan, membatasi hak proposal pemegang saham minoritas, serta memperkenalkan sistem pengawasan internal yang lebih independen.

Berdasarkan teori institusional, penelitian ini menjelaskan bagaimana tekanan regulatif dan kebutuhan akan legitimasi mendorong perubahan struktural dalam perusahaan. Meskipun praktik *soukaiya* belum sepenuhnya hilang, dampaknya berkurang secara signifikan setelah revisi dilakukan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara regulasi formal, praktik informal, dan transformasi tata kelola perusahaan di Jepang.

**Kata kunci:** Revisi Kode Komersial 1993, *soukaiya*, tata kelola perusahaan, Jepang, teori institusional.

## ABSTRACT

This study analyzes the impact of the 1993 Revision of the Japanese Commercial Code on corporate governance, focusing on the practice of *soukaiya*—a form of corporate extortion involving shareholder meetings. Before the revision, the *keiretsu* structure and weak regulatory oversight allowed loopholes for *soukaiya* to openly pressure companies. Revisions were made to increase transparency, strengthen accountability, and provide clearer legal protection against this extortion practice.

This study uses a qualitative approach with a case study method to analyzes policy change through a literature review and highlights the Nissan case as an illustration of the company's vulnerability before the revision. The findings show that the revision successfully tightened voting rights, increased financial transparency, introduced limitations on proposal rights, and introduced a more independent internal control system.

Based on institutional theory, this study explains how regulatory pressures and the need for legitimacy drive structural changes within companies. Although the practice of *soukaiya* has not completely disappeared, its impact was significantly reduced after the revisions were made. This research contributes to the understanding of the relationship between formal regulation, informal practices, and corporate governance transformation in Japan.

**Keywords:** Revised Commercial Code 1993, *soukaiya*, corporate governance, Japan, institutional theory.

## 要旨

本研究は、1993年の日本商法改正が企業統治に与えた影響を分析し、株主総会を伴う企業恐喝の一形態である総会屋に焦点を当てています。改正前、系列構造と弱い規制や監督により、総会屋が企業に対して公然と圧力をかける余地が存在していました。改正は、透明性を高め、責任を強化し、この恐喝行為に対する法的保護を明確化することを目的として行われました。

本研究は、文献レビューを通じて政策変更を分析するケーススタディ手法を用いた質的アプローチを採用し、改正前の同社の脆弱性を示す事例として日産自動車のケースを強調した。調査結果によると、改正は議決権の強化、財務透明性の向上、提案権の制限の導入、より独立した内部統制システムの導入に成功しました。

制度理論に基づき、本研究は規制圧力と正当性の必要性が企業内の構造的変化を促す仕組みを説明しています。総会屋の行為は完全に消滅したわけではありませんが、改正後その影響は大幅に軽減されました。本研究は、日本における形式的な規制、非公式な実践、および企業統治の変革との間の関係を理解する上で寄与しています。

**キーワード**：1993年商法改正、総会屋、企業統治、日本、制度理論。